

PERDAGANGAN REMPAH : PENGARUHNYA TERHADAP MOBILITAS PENDUDUK, PERMUKIMAN, PERKEMBANGAN KOTA DAN PERTAHANAN MASA KOLONIAL : STUDI KASUS PULAU AMBON DAN SAPARUA

Wuri Handoko*

Derterminasi perdagangan rempah, telah menciptakan tatanan baru sebuah wilayah menjadi lebih maju dan berkembang baik secara fisik maupun sosial. Pulau Ambon dan Saparua adalah salah satu kota dengan tipikal kota Kolonial yang kental. Hal ini karena kota ini menjadi salah satu sentra perdagangan rempah, terutama cengkeh pada masa Kolonial. Kota Ambon sedniri adalah kota pusat dagang VOC pada abad 17-18 M. Perkembangan ini dipicu oleh determinasi perdagangan rempah yang pesat di kedua wilayah ini, sehingga berpengaruh terhadap stimulus laju mobilitas penduduk, pemukiman, perkembangan kota dan strategi pertahanan.

Kata kunci: perdagangan, mobilitas, pemukiman, pertahanan

Latar Belakang

Dalam sejarah Nusantara, pengaruh Kolonial di Maluku, telah sangat dikenal. Hal ini karena lamanya pihak Kolonial bercokol di bumi rempah-rempah ini (hampir empat abad). Maluku dikenal sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam konteks kolonisasi Eropa di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat saat inipun, pengaruh budaya kolonial terutama Belanda, masih sangat kental. Bahkan di bidang bahasapun juga dapat diidentifikasi bentuk pengaruhnya. Antara lain banyak kalimat-serapan bahasa Belanda yang sering dipakai dalam bahasa pergaulan sehari-hari orang Maluku. Dalam bidang budaya, pengaruh itu juga dapat diamati baik budaya hidup yang masih dijalankan sehari-hari, religi maupun berdasarkan tinggalan budaya benda berbentuk bangunan monumental berciri arsitektur kolonial. Kentalnya budaya peninggalan kolonial, sehingga karakteristik budaya Maluku sangat lekat dengan budaya kolonial. Sejarah mencatat, Tahun 1596, penjelajahan Bangsa Eropa pertama dipimpin Cornelis de Houtman masuk ke Nusantara. Ekspedisi ini sekaligus menjadi titik awal rentang panjang sejarah kolonisasi Eropa di Nusantara. Mulai dari Portugis hingga Belanda.

Sejarah, telah banyak menuliskan kiprah kolonial di bumi Maluku. Terutama dihubungkan dengan perluasan perdagangan dan penguasaan komoditi lokal Maluku yang sangat populer di dunia. Dalam sejarah perdagangan dunia, sejak awal masehi wilayah strategis Maluku termasuk dalam lintasan perdagangan yang disebut *jalur sutera*. Pada abad X jalur sutra merupakan jalur yang sangat penting untuk hubungan timbal balik baik dalam segi perdagangan, kebudayaan, agama maupun pengetahuan. Perdagangan ini tidak hanya menawarkan komoditi sutera, tetapi juga komoditi lain terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Justru karenanya belakangan orang menyebutnya sebagai jalur rempah-rempah. Hal ini karena justru rempah-rempah kemudian menjadi komoditi utama perdagangan dunia. (Lapian, et.al. 2001: 39).

Kepulauan Maluku sendiri merupakan surganya rempah-rempah. Wilayah ini kemudian terkenal dengan *Spice Island* oleh dunia barat. Wilayah Maluku, dari segi ekonomi merupakan wilayah penghasil rempah-rempah paling utama, yang antara lain menyebabkan wilayah tersebut menjadi ajang potensial pertarungan kepentingan hegemoni ekonomi, dan akhirnya bermuara pada pertarungan politik dan militer (Meilink-Roelofs, 1962:93-100; dalam Ambary, 1998:150).

Didorong oleh meningkatnya kebutuhan dan keuntungan besar yang diperoleh dalam perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa berusaha memperoleh rempah-rempah langsung dari tangan pertama. Dimulai oleh Portugis pada tahun 1511, yang kemudian berhasil menguasai pusat perdagangan di Selat Malaka. Dan pada tahun berikutnya, kapal-kapal Portugis telah tiba di bandar-bandar Maluku (Djafaar, 2006:18).

Sejak saat itu bangsa –bangsa Eropa saling bergantian untuk menguasai Maluku. Kepulauan Maluku sebagai pusat produksi rempah-rempah terutama cengkeh dan pala pada masanya juga menjadi ajang perebutan dan persaingan banyak negara di dunia. Hampir seluruh negara dari berbagai belahan dunia berjejal menduduki kepulauan Maluku. Portugis dan Belanda adalah dua negara yang paling bersaing menguasai wilayah ini.

Sejarah Perdagangan Rempah di Pulau Ambon dan Saparua

Tahun 1513, Bangsa Portugis mendarat di Pulau Ambon. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Wilayah Maluku. Oleh Portugis, wilayah Ambon adalah menjadi pusat aktivitas baru setelah mereka terusir dari Ternate. Meski demikian, di Pulau Ambon, bangsa Portugis mendapat perlawanan dan diserang oleh penduduk lokal, yakni penduduk muslim Hitu, yang sebelumnya telah berdagang dan memiliki mata rantai religius dengan pesisir pantai utara Jawa. Namun demikian tahun 1521 Bangsa Portugis sempat mendirikan pabrik meski selalu ditentang hingga tahun 1580. Di Pulau Ambon, bangsa Portugis tidak mendapatkan otoritas dari penduduk lokal untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah.

Tahun 1605, giliran Belanda menguasai Pulau Ambon, tahun itu adalah tahun kekalahan Portugis dari Belanda. Bangsa Portugis pada tahun itu juga terusir dari Pulau Ambon dan kedudukannya digantikan oleh Belanda. Belanda mengambil alih benteng-benteng yang semula dibangun oleh Portugis. Oleh Belanda, Kota Ambon dijadikan markas (VOC) mulai dari 1610 sampai 1619. Belanda berhasil menanamkan monopoli perdagangan rempah di Pulau Ambon. Di Kota Ambon Belanda menjadikannya sebagai sebagai pusat produksi dan pemasaran rempah-rempah. Sementara itu pulau-pulau di sekitarnya diharuskan mengirim produksi komoditinya ke Pulau Ambon untuk menjamin atau mengamankan monopolinya di Ambon. Sepanjang periode Belanda, Kota Ambon kota adalah pusat kegiatan militer Belanda yang berpusat di Benteng Victoria.

Sementara itu Pulau Saparua, adalah salah satu pulau yang terdekat dengan Pulau Ambon. Diantara pulau-pulau Lease (Saparua, Haruku dan Nusa Laut), Pulau Saparua adalah yang terbesar. Dalam sejarah perniagaan, Pulau Saparua merupakan salah satu kota pemasok cengkeh terbesar di wilayah Lease. Pada masa kolonial, hampir seluruh wilayah di Pulau Saparua mengembangkan tanaman cengkeh untuk memenuhi kebutuhan stok (pasokan) komoditi cengkeh dari pihak Kolonial yang berpusat di Kota Ambon.

Sejak awal abad 17 baik Portugis maupun Belanda, bergantian menduduki Saparua. Benteng Duurstede di Kota Saparua menjadi bukti penguasaan pihak asing tersebut. Kota Saparua sebagai pusat

pemerintahan Kolonial di Pulau Saparua, merupakan basis pertanian kolonial yang utama. Setelah Portugis terusir dari Saparua, Belanda menjadi satu-satunya pihak asing yang menguasai Saparua, hingga meletusnya perang Pattimura tahun 1817. Perang itu salah satunya adalah akibat monopoli perdagangan cengkeh oleh pihak Belanda. Pihak pribumi yang tidak menerima perlakuan Belanda, mengangkat senjata melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura.

Tradisi Perkebunan Cengkeh dan Sistem Penguasaan Tanah

A. Berkebun Cengkeh dan Pala

Masyarakat di pulau Ambon dan Saparua pada umumnya, adalah masyarakat yang sejak dulu mengelola kebun cengkeh sebagai komoditi utama. Beberapa toponim menunjukkan adanya pohon-pohon cengkeh yang telah berumur sangat tua. Di desa Itawaka, Pulau Saparua, menurut sumber penduduk menyebutkan terdapat pohon cengkeh yang telah berumur sekitar 400an tahun (pers com, 2008). Bukti lapangan menunjukkan pohon, dengan usia ratusan tahun tersebut memiliki diameter yang sangat besar. Meskipun tidak produktif lagi, namun sesekali masih menghasilkan bunga cengkeh. Selain itu, penduduk pada umumnya menanam bibit cengkeh yang sejak dulu telah dikembangkan, walaupun belakangan bermacam-macam jenis cengkeh juga dikembangkan. Tradisi perkebunan cengkeh dibangun paling tidak sejak abad 17 M. Setup keluarga mendapat sebidang tertentu untuk ditanami dengan sejumlah pohon cengkeh.

B. Penguasaan Tanah : Tanah Datti dan Tanah Pusaka

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber para tokoh masyarakat dan beberapa literature menyebutkan di wilayah Maluku (termasuk Pulau Ambon dan Saparua) terdapat dua model penguasaan tanah yakni Tanah Datti dan Tanah Pusaka. Tanah datti adalah, tanah yang dikelola secara turun temurun yang dikelola oleh setiap kelompok marga. Namun ketika anggota marga ada yang menikah dengan marga lain, terutama kaum wanitanya maka yang bersangkutan tidak lagi berhak atau tidak mendapat bagian lagi dari tanah datti. Sementara tanah pusaka, adalah tanah yang dikelola turun temurun oleh setiap marga dan keluarga, dan dalam waktu yang terus menerus dan tidak dapat diputuskan haknya,

meskipun salah satu anggota marga menikah dengan marga lainnya. Tanah-tanah dati dan juga tanah pusaka antar setiap marga biasanya diberi batas-batas yang telah disepakai, biasanya berupa batas atau pagar hidup bisa pula tanda batas lainnya yang mudah dikenali.

Yang menarik, pengaturan tanah dati itu sendiri lahir pada masa pendudukan Kolonial tahun 1823. Berdasarkan beberapa catatan sejarah di Maluku, tahun itu merupakan tahun peralihan atau masa transisi dari penguasaan Inggris kembali ke penguasaan Belanda. Apakah peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada masa itu berhubungan dengan masa peralihan itu, tampaknya masih membutuhkan kajian lagi. Yang jelas, pengaturan tanah datti, merupakan peraturan yang dibuat oleh Belanda dan sampai saat ini masih diwarisi dan dipertahankan. Kemungkinan, pengaturan tanah datti, juga dimaksudkan oleh Belanda untuk mempermudah pengaturan dan pengawasan lahan-lahan perkebunan cengkeh. Dengan pengawasan dan pengaturan yang lebih mudah, maka pihak Kolonial (Belanda) akan semakin mudah menguasai dan memonopoli komodi dagang cengkeh tersebut.

Mobilitas Penduduk, Permukiman dan Perkembangan Kota

A. Masa Penguasaan Portugis

Gejala meningkatnya mobilitas penduduk, berdasarkan data arkeologi, tampak dimulai dari periode kolonisasi Portugis, yakni dengan munculnya embrium kota. Leiriza (2004:21) sebagaimana yang dikutip Ririmasse (2006) menguraikan embrio kota Ambon, ditandai oleh pendirian benteng Kota Laha, yang pada masa kemudian yakni pada masa kolonisasi Belanda, dikonversi menjadi Benteng dengan tipe Belanda yang diberi nama Benteng New Victoria. Tanda-tanda mobilitas penduduk, ditandai dengan tumbuhnya pemukiman-pemukiman sederhana, membentang di sepanjang pantai, di sisi Timur dan Barat Benteng, juga di sebelah selatan benteng. Data sejarah dari seorang misionaris Portugis menunjukkan, jumlah rumah disekitar benteng ini pada akhir abad ke-16 adalah sekitar 500 unit (Ririmase, 2006). Pada masa itu jumlah penduduk kota ambon pada akhir abad ke-16 adalah sekitar 1500 jiwa. Dengan jumlah rumah sekitar 500 buah yang dibangun di sepanjang pantai, di sisi timur, barat, dan selatan benteng 'Kota Laha'. Permukiman penduduk yang membentuk 'kota' ini hanya dipisahkan oleh beberapa jalan sempit

dari tembok benteng. Saat itu belum dikenal penataan kota, letak rumah dan jalan sangat tidak beraturan. Meski demikian secara berkala mulai muncul suatu pola yang membedakan perumahan penduduk berdasarkan empat kelompok masyarakat yang tercipta saat itu.

Leirissa dkk (2004) sebagaimana yang dituliskan kembali oleh Ririmasse (2006) telah menguraikan kelompok penduduk pemukim Kota Ambon awal masa pendudukan Portugis, sebagai berikut :

Kelompok pertama adalah sejumlah orang-orang Portugis dan bekas tentara Portugis yang memilih untuk tinggal di Ambon. Kelompok masyarakat ini dikenal sebagai casado. Menurut catatan sejarah, hingga akhir abad ke-16 diperkirakan ada sekitar 90 rumah yang didirikan bagi kelompok ini dan beberapa di antaranya didirikan dengan sangat indah.

Kelompok kedua adalah kelompok "Mahardhika" atau 'Mardika' yang mendiami sisi sebelah timur benteng. Menurut keterangan orang-orang Belanda, kelompok Mardika ini tiba di Ambon dari Ternate sekitar tahun 1575. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa kelompok ini muncul dari kelompok budak yang telah dibebaskan oleh para pemiliknya.

Kelompok ketiga adalah masyarakat lokal dari berbagai negeri di Pulau Ambon. Jumlah mereka pada akhir abad ke-16 diperkirakan sekitar 1500 jiwa. Mereka umumnya berasal dari Hative, Tawiri dan Halong, dan menjadi tenaga andalan Portugis ketika membangun benteng Kota Laha. Terdapat juga kelompok masyarakat yang berasal dari Nusaniwe, Urimesing, Waai dan Soya. Mereka ini menghuni sekitar 100 unit rumah yang sangat sederhana di daerah yang sekarang berada antara Batumerah dan Mardika serta di wilayah timur sungai Batu Gajah.

Kelompok keempat adalah para misionaris dari Eropa. Jumlah mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya karena keberadaan mereka selalu diikuti oleh para budak dan pengikut mereka, maka terbentuklah suatu kelompok masyarakat baru dalam jumlah yang cukup besar.

Berdasarkan uraian diatas, tampak sekali permukiman penduduk berkembang karena mengikuti pola mobilitas sosial masyarakat. Mobilitas penduduk ditandai oleh masuknya kelompok sosial lain, yakni kelompok Mardika (budak yang telah dibebaskan). Kemungkinan pada masa kemudian, penduduk Mardika menjadi salah satu kelompok sosial yang paling banyak mempengaruhi perkembangan permukiman kota. Formasi sosial masyarakat yang terdiri dari empat kelompok, menandai adanya

mobilitas masyarakat lebih banyak ditimbulkan oleh faktor eksternal. Para misionaris, tentara portugis dan para budak, merupakan kelompok eksternal yang meramalkan pertumbuhan permukiman. Sementara itu penduduk lokal, meskipun dalam kuantitas yang besar, merupakan kelompok yang secara internal tak banyak mendominasi pertumbuhan permukiman.

B. Masa Penguasaan Belanda

Ciri pesatnya kota dan meningkatnya mobilitas penduduk ditandai oleh pasar dan pelabuhan sebagai ciri kota dagang sekaligus kota pelabuhan, sebagai respon atas kemajuan atau pesatnya perdagangan di Kota Ambon.

Tahun 1690 pemerintah VOC di Ambon mendirikan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai pasar. Lokasinya di tepi pantai tepat di sebelah barat benteng Victoria. Menurut informasi Valentijn, ukuran gedung pasar ini lebih besar dari ukuran gedung-gedung gereja. Valentijn bahkan menyatakan kekagumannya akan keindahan bentuk bangunan pasar ini dan keletakannya yang begitu bagus. Bangunan pasar ini digambarkan tidak memiliki tembok hanya berupa bangunan bergenteng yang langsung ditopang pilar-pilar. Di pasar inilah penduduk dari berbagai negeri di Pulau Ambon datang untuk berjualan berbagai kebutuhan sehari-hari. Keletakan pasar ini mungkin juga dipengaruhi oleh lokasi Kampung Cina di sekitar jalan Chinesestraat yang juga merupakan kelompok dominan pelaku ekonomi masa itu. Tentunya bukan suatu kebetulan jika pada masa yang lebih kemudian lokasi pasar dan pertokoan di kota Ambon juga terletak di sebelah barat benteng Victoria. Hal mana yang menunjukkan kesinambungan wilayah itu sebagai sentra ekonomi (Leirizza dkk, 20004, dalam Ririmasse, 2006b).

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, kita dapat melihat perkembangan permukiman kota akibat pengaruh Kolonial. Persentuhan masyarakat lokal dengan pihak Kolonial ditengah aktifitas perdagangan yang pesat memicu mobilitas sosial masyarakat semakin tinggi. Toponim-topnim permukiman penduduk lokal juga semakin menyebar, yang disebabkan oleh pengaruh mobilitas kerja masyarakat pribumi. Selain itu, di Ambon interaksi dengan penduduk luar terutama kelompok Bugis Makassar sudah dicatat sejak Abad ke-17. Mereka ini umumnya termasuk

dalam kelompok pribumi yang berasal dari berbagai pelosok Nusantara dan menetap di Ambon. Orang-orang Makassar masa itu tercatat sebagai kelompok pribumi yang memiliki modal, dan karena itu sering ditunjuk sebagai pimpinan kelompok migran lokal oleh pemerintah VOC. (Tim Penyusun 2004, dalam Ririmasse 2006). Tentu saja, hal ini berdampak pada pesatnya pertumbuhan kota sejurus pula dengan perkembangan permukiman penduduk. Struktural jalan kota dan pasar sebagai pusat transaksi jual beli, menandai pesatnya pertumbuhan dan mobilitas penduduk. Dengan demikian pada masa penguasaan Belanda, mobilitas penduduk semakin besar, hal ini juga disebabkan oleh pesatnya laju perdagangan di bawah penguasaan kolonial.

Di Pulau Saparua, tampaknya Kota Saparua, yang kini menjadi ibukota Kecamatan merupakan pusat kota kolonial di pulau ini. Kota Saparua pada masa penguasaan Belanda, merupakan pusat pemerintahan Kolonial. Benteng Duurstede, merupakan benteng terbesar dan termegah yang dibangun Belanda di pulau ini. Kegiatan dalam benteng dapat diidentifikasi dengan adanya beberapa sisa bangunan turutan di dalam benteng. Tata kota Saparua, merupakan tipikal kota Kolonial, meskipun tidak sebesar Kota Ambon. Beberapa indikator kota kolonial, misalnya dapat diidentifikasi antara lain oleh keberadaan benteng, lapangan di depan benteng, tugu kolonial di samping lapangan dan beberapa bangunan-bangunan lain di luar benteng berciri kolonial. Tidak menutup kemungkinan, jaringan jalan yang ada di kota Saparua saat ini, merupakan perkembangan dari jaringan jalan yang dibuat Belanda pada masa lalu. Benteng dan bangunan-bangunan lain di luar benteng di Kota Saparua, mengindikasikan adanya kegiatan pemerintahan dan perekonomian yang dipusatkan di Kota Saparua oleh pemerintahan Belanda.

Monopoli Perdagangan, Pertahanan dan Penempatan Perbentengan

Daya tarik rempah-rempah yang dihasilkan oleh dunia Timur yang kemudian mengundang kedatangan bangsa Eropa ke nusantara untuk memperoleh rempah-rempah langsung dari tangan pertama. Usaha tersebut kemudian berhasil dengan dikuasainya pusat perdagangan di Selat Malaka oleh Bangsa Portugis pada tahun 1511. Dan pada tahun berikutnya, kapal-kapal Portugis telah tiba di bandar-bandar Maluku (Djafaar, 2006:18).

at ini kemudian telah mempengaruhi hubungan internasional antar sa dan menjadi faktor utama perjalanan sejarah dunia sekitar abad hingga XX. Berlangsungnya kolonisasi di negara Asia dan Afrika yang nya terdiri dari kerajaan-kerajaan lokal menjadi salah satu buktinya. an tujuan awal ekonomi, orang-orang Eropa hanya menempatkan al perdagangannya di wilayah-wilayah penghasil komoditi yang tuhkan. Akan tetapi, melihat keuntungan yang diperoleh dalam agangan rempah-rempah yang besar maka penguasaan atas wilayah hasil komoditi tersebut menjadi keharusan. Hal inilah yang menjadi or utama pembangunan benteng-benteng pertahanan di wilayah- yah yang dianggap penting. (Mansyur, 2006).

Pembangunan benteng-benteng tersebutlah yang kemudian jadi faktor pendukung keberhasilan bangsa kolonial menguasai antara. Dengan menerapkan strategi dan sistem pertahanan pada awal dukannya di setiap daerah yang mereka anggap penting atau untungkan maka penguasaan tersebut dapat berlangsung selama abad-abad. Abbas (2005), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang atari pemilihan lokasi pendirian sebuah benteng diantaranya:

1. Pentingnya suatu daerah pada masa pendirian benteng (misalnya potensi tempat itu untuk dijadikan pusat perdagangan, adanya suplai produksi yang dibutuhkan, dan potensi untuk digunakan sebagai pusat pemerintahan lokal).
2. Ancaman atau penolakan yang dihadapi (misalnya ancaman eksternal dari orang-orang asing atau ancaman internal dari penguasa setempat).
3. Strategi yang diterapkan dalam upaya menaklukkan suatu wilayah tertentu untuk perluasan kekuasaan.

Benteng-benteng yang dibangun oleh bangsa Eropa khususnya anda dalam usaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di luku. Selain itu, fokus terhadap Belanda (termasuk VOC) dalam hal tidak lain dimaksudkan karena dalam perebutan diantara negara-negara opa yang menginginkan penguasaan terhadap wilayah ini, dianggap yang hasil. Sementara itu kurun waktu selama abad XVII hingga abad XIX rupakan perjalanan waktu yang cukup panjang dalam usaha tersebut. lam kurun waktu tersebutlah bangsa Eropa membangun benteng- nteng pertahanan di Maluku (Mansyur, 2006)

Pada masa Kolonial Belanda, masa di mana perubahan politik, sosial, ekonomi di Maluku terjadi secara besar-besaran. Setelah hampir seluruh wilayah di Maluku bertaut dengan budaya Islam, dalam waktu relatif cepat pengaruh Kolonial merangsek pesat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Maluku. Praktis hegemoni Kolonial Belanda di Maluku sangat besar, baik secara politik, ekonomi, sosial maupun ideologi. Namun demikian, proses itu bukan berarti mudah. Perlawanan terhadap penjajah Belanda hampir dikobarkan di seluruh kepulauan Maluku. Perang demi perang berlangsung. Segala taktik perang dilancarkan. Berbagai senjata perang di pertontonkan di medan laga. Bukti-bukti arkeologis soal itu juga sangat berlimpah. Pada hampir seluruh situs Kolonial di Maluku, kita bisa dapatkan benteng-benteng pertahanan berikut meriam-meriam di lokasi sekitarnya. (Handoko:2006a)

Secara kronologis sistem pertahanan pada abad XVI didominasi oleh Portugis dengan membangun 3 benteng pertahanan diantaranya pada tahun 1512, 1532 dan 1640 di Ternate. Sementara Belanda memutuskan untuk mulai membangun sistem pertahanannya di Ambon dengan membangun benteng pada tahun 1599. Sistem pertahanan yang kuat dibangun oleh Portugis sebagai langkah antisipasi terhadap serangan pesaingnya sesama bangsa Eropa di Ternate. Sementara itu, persaingan antara Ternate yang didukung oleh Portugis dan Tidore yang didukung oleh Spanyol memberi andil cukup besar dalam sistem pertahanan yang dibangun di wilayah ini. Di pihak lain, Belanda yang memperkuat pertahanannya di bagian selatan terutama Ambon dan Banda berebut pengaruh dengan Inggris. Akan tetapi, beberapa perubahan politik antara Belanda dan Inggris menyebabkan kedua negara ini mengadakan perjanjian rahasia untuk memaksa Portugis dan Spanyol hengkang dari wilayah ini. Perjanjian pada tanggal 17 Juli 1619 itu berisi tentang pembagian pembiayaan untuk "proyek" tersebut, East India Company (Inggris) menyediakan sepertiga dari tenaga manusia, biaya dan kapal sedangkan Vereenigde Oost Indische (Belanda) menyediakan dua pertiga sisanya (Hanna, 1983:49).

Mansyur (2006) membagi (tiga) fase sejarah penguasaan VOC dan pemerintah Belanda atas berbagai wilayah di Maluku, yaitu:

1. Pada awal kedatangannya VOC pada saat itu hanya menempatkan wakil-wakil perdagangannya diberbagai wilayah di Maluku. Hal ini karena pada awalnya mereka datang dengan tujuan perdagangan.
2. Fase selanjutnya dengan tujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah dan berbagai komoditi lainnya. Mereka kemudian membangun benteng-benteng pertahanan untuk meredam perlawanan penguasa-penguasa lokal dan memenangkan persaingan dengan pedagang-pedagang asing lainnya. Pada masa ini, mereka mengatur berbagai urusan perdagangan dan hal-hal lainnya di dalam benteng (kehidupan intra muros).
3. Dan fase terakhir berlangsung setelah keadaan mulai kondusif dan perlawanan-perlawanan rakyat Maluku berhasil diredam. Fase ini juga ditandai dengan pembangunan berbagai fasilitas di luar benteng oleh Pemerintah Belanda. Dengan adanya berbagai fasilitas ini maka kehidupan kota kolonial telah dimulai. Kota-kota yang ada di Maluku seperti Ambon, Banda, Ternate, dan Tidore bahkan kota-kota kecil memperlihatkan hal ini. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan swasta bahkan diberikan hak oleh Pemerintah Belanda untuk mengelola perkebunan-perkebunannya. Faktor lain yang menyebabkan keleluasaan Pemerintah Belanda di nusantara pada umumnya adalah dengan adanya perjanjian antara negara kolonial di Eropa yang memberikan "jatah" penguasaan di wilayah ini.

Dengan demikian, sistem pertahanan di Maluku pada abad XVII hingga XIX, perlu dikaji sebagai usaha pemahaman terhadap sejarah tidak hanya sejarah Maluku tetapi juga sejarah bangsa Indonesia. Selama kurun waktu tersebut perebutan wilayah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia tidak hanya melibatkan pedagang nusantara dan pedagang-pedagang Eropa tetapi juga pedagang dari negara lain seperti Cina dan Arab.

Pulau Ambon dan Saparua, sebagai obyek studi merupakan daerah penting sebagai salah satu sentra penghasil komoditi cengkeh. Di Pulau Ambon dan wilayah Kota Ambon tercatat Belanda setidaknya membangun 7(tujuh) benteng pertahanan, sementara di Saparua ada 4 (empat) benteng pertahanan, yakni Ouw, Delf, Hollandia dan

Duurstede di kota Saparua, sebagai pusat pemerintahan kolonial pada masa itu. Hasil survei tim memperoleh data bahwa, keletakan benteng di wilayah Ambon dan Saparua, terletak di pesisir. Keletakan benteng di daerah pesisir memberikan asumsi bahwa fungsi benteng dengan strategi dan taktik perang maritim. Profil wilayah Maluku yang merupakan wilayah Kepulauan sangat tepat dengan strategi ini (Mansyur, 2006). Selain itu lokasi benteng yang berdekatan dengan pantai mempermudah mobilitas barang dan manusia dari dalam benteng menuju kapal. Alasan ini dengan pertimbangan bahwa lokasi benteng berjarak relatif dekat dengan bibir pantai tentu sangat efisien dan ekonomis dalam proses pengangkutan barang dan komoditi perdagangan dari dalam benteng ke kapal. Alasan ini berlaku dengan catatan, opsi pemilihan lokasi berada di tangan orang-orang Eropa, atau bila memang ada penguasa lokal masa itu, maka dapat diasumsikan orang-orang Eropa sudah mendapat otorisasi dari penguasa lokal untuk menggunakan lokasi dimaksud sebagai benteng. Kemungkinan kedua tentang pemilihan lokasi benteng adalah penguasa lokal di masa itu memberikan pembatasan kepada pihak Belanda dalam mendirikan benteng hanya bisa di lokasi pesisir (Ririmasse, 2006b).

Pada abad ke-17, sistem pertahanan didominasi oleh Belanda dengan membangun 22 benteng pertahanan. Daerah-daerah yang diperkuat oleh Belanda pada saat itu yaitu pulau Ambon sebagai pusat aktifitas perdagangan dan pemerintahan dengan membangun 6 benteng pertahanan. Sebagian besar dari benteng tersebut ditempatkan di Hitu dengan membangun 4 kubu pertahanan untuk meredam perlawanan rakyat Hitu (Mansyur, 2006). Dibangunnya banyak benteng di wilayah Hitu kemungkinan berhubungan dengan posisi dan peran Hitu dalam rantai perdagangan rempah. Schrieke (1963) menuliskan Pulau Ambon, terutama Hitu, berperan sebagai *suplay station* perjalanan rempah-rempah (cengkeh dan pala) antara Banda dan Ternate (Schrieke, 1963 dalam Putuhena, 2001:64).

Pada abad 15 M, pengaruh Islam di tanah Hitu menyebar hingga ke Saparua tepatnya kerajaan Iha (Syaranamual dan Pattikayhatu, 1997:30). Tak hanya sebagai pusat penyebaran Islam, Kerajaan Hitu bahkan juga menjadi pelabuhan niaga yang penting pada masa itu. Para pelaut dan pedagang dari seluruh kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara berdatangan dan menyinggahi Kerajaan Hitu.

Lebih dari itu, Hitu bahkan tercatat sebagai pusat niaga di wilayah Kepulauan Maluku, mekipun gerak perdagangan di mulai dari Ternate. Hal ini seperti yang diungkapkan R. Moh Ali (1963):

Gerak niaga dimulai di Ternate dan memusat di Hitu (Ambon), setelah melalui bandar Gresik, Tuban, Jepara, Demak dan memusat lagi di Malaka dan berpadu dengan niaga internasional. Hitu dapat memusatkan seluruh hidup niaga Maluku dalam gerak ambil rempah-rempah dan seluruh gerak tekstil, beras, perhiasan, senjata. Serentak dengan gerak itu agama Islam meluas di Maluku melalui saluran perdagangan (R. Moh Ali, 1963:106-107 dalam Syaranamual dan Pattikayhatu, 1997:31)

Keterangan di atas sangat jelas memaparkan, bersamaan dengan puncak berkembangnya Islam, seiring itu pula perdagangan juga semakin berkembang di Kerajaan Hitu. Dengan jelas pula disebutkan, bahwa Hitu (Ambon) merupakan salah satu pusat niaga di kepulauan Maluku.

Di Saparua, dibangun 4 (empat) kubu pertahanan diantaranya, benteng Duurstede pada tahun 1690/1691, Hollandia pada tahun 1690, dan Hollandia dan Ouw. Salah satu benteng tersebut menjadi kubu pertahanan dalam perang besar Belanda meredam perlawanan rakyat Maluku dibawah kepemimpinan Kapitan Pattimura. Penempatan Benteng itu pada umumnya di wilayah-wilayah pesisir bagian selatan Pulau Saparua. Secara geografis, hal itu kemungkinan letaknya yang lebih mudah untuk pengawasan distribusi cengkeh keluar dan masuk ke wilayah itu. Hal itu karena secara geografis wilayah itu berhadapan langsung dengan Laut Banda di sebelah selatan, yang kemungkinan digunakan sebagai jalur pendistribusian rempah dari wilayah sebelah selatan Pulau Saparua. Secara geografis pesisir selatan Pulau Saparua juga lebih mudah menjangkau wilayah pulau Liannya seperti Pula Ambon, haruku dan Nusa Laut.

Ambon dan Saparua merupakan dua dari beberapa wilayah strategis di Kepulauan Maluku bagian selatan. Ambon dan Saparua merupakan salah satu sentra penghasil cengkeh, maka wajar jika dikedua pulau tersebut intensitas penguasaan Belanda diperketat dengan pendirian benteng-benteng pertahanan. Pendirian benteng selain pertahanan untuk mengantisipasi perlawanan penguasa dan masyarakat lokal, juga sebagai medium pertahanan dalam persaingannya dengan pihak Eropa lainnya. Tak kalah pentingnya, pendirian benteng juga sebagai pusat pemerintahan,

sekaligus sebagai medium untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan perekonomian dalam hal ini produksi dan distribusi produk lokal (cengkeh). Pulau Saparua, sebagai penghasil cengkeh terbesar setelah di Kepulauan Lease, kemungkinan memasok cengkeh-cengkeh dari setiap desa di wilayah Pulau itu, kemudian mendistribusikannya ke Kota Saparua, untuk selanjutnya diseberangkan ke Kota Ambon sebagai pusat perdagangan cengkeh

Selain, membangun sistem pertahanan yang kuat dan maju, untuk menguasai perdagangan rempah terutama cengkeh dan pala, Belanda juga meluncurkan strategi yang sistematis terhadap pola penguasaan lahan dan kebun cengkeh masyarakat lokal. Secara sistematis, Belanda berupaya mengintervensi sistem aturan kepemilikan lahan cengkeh milik masyarakat. Sebagai indikator adalah adanya sistem penguasaan *Tanah Datti* yang merupakan sistem kebijakan penguasaan tanah yang dicetuskan oleh pemerintah Belanda. Pada Tahun 1824, penguasaan tanah datti muncul disamping pemilikan lahan berdasarkan aturan tanah pusaka. Belum diketahui jelas, apa keuntungan Belanda pada penerapan kebijakan ini. Namun sejak adanya sistem tanah dati, maka pemilik (biasanya seorang perempuan) dari marga tertentu, tidak berhak lagi memperoleh hasil lahan ketika menikah dengan marga lain. Kemungkinan keuntungan Belanda adalah memperkecil ruang kepemilikan lahan oleh marga, sehingga pihak Belanda akan lebih mudah menguasai tanah atau lahan cengkeh masyarakat.

Penutup

Tak dapat dipungkiri perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi utama di wilayah Kepulauan Maluku, merupakan roda penggerak terhadap berbagai bentuk perubahan masyarakatnya. Perdagangan rempah-rempah terbukti menjadi daya tarik pihak kiolonial untuk berbondong-bondong menduduki wilayah ini. Di lingkup internal pribumi (masyarkat Maluku sendiri), juga dapat dianggap sebagai salah satu faktor pemicu berkembangnya tatanan sosial penduduk. Mobilitas penduduk salah satunya dipicu oleh perdagangan rempah yang semakin pesat. Perdagangan rempah yang semakin pesat menimbulkan hadirnya berbagai komunitas penduduk baik pihak Kolonial sendiri maupun masyarakat lokal serta masyarakat dari pulau lainnya di Nusantara untuk membentuk kawasan-kawsan

pemukiman yang tentu saja memicu pesatnya perkembangan pemukiman menuju tata ruang kota yang lebih kompleks. Banyaknya pembahasan tentang pweerkembangan pemukiman dan perkembangan kota, namun melupakan jakinan perdagangan, apalagi di wilayah Maluku, sehingga tulisan ini diharapkan dapat menambah kajian dan perluasan gagasan untuk pendalaman kajian pemukiman dan perkembangan tata ruang kota.

Pesatnya perdagangan rempah-rempah, telah menimbulkan berbagai bentuk persaingan antar beberapa pihak kolonial untuk dapat monopoli perdagangan. Tentu saja kajian perdagangan ini juga dapat menjadi bahan untuk perluasan kajian tentang berbagai strategi pertahanan dalam upaya monopoli perdagangan. Dapat disimpulkan maraknya pembangunan atau pendirian benteng-benteng pertahanan seiring dengan pesatnya laju perdngangan.

Pendirian benteng selain pertahanan untuk mengantisipasi perlawanan penguasa dan masyarakat lokal, juga sebagai medium pertahanan dalam persaingannya dengan pihak Eropa lainnya. Tak kalah pentingnya, pendirian benteng juga sebagai pusat pemerintahan, sekaligus sebagai medium untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan perekonomian dalam hal ini produksi dan distribusi produk lokal (cengkeh). Selain, membangun sistem pertahanan yang kuat dan maju, untuk menguasai perdagangan rempah terutama cengkeh dan pala, Belanda juga melancarkan strategi yang sistematis terhadap pola penguasaan lahan dan kebun cengkeh masyarakat lokal. Secara sistematis, Belanda berupaya mengintervensi sistem aturan kepemilikan lahan cengkeh milik masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hanna, W.A, 1983 **Kepulauan Banda dan Akibatnya di Kepulauan Pala**. PT. Gramedia. Jakarta
- Handoko, Wuri 2006a *Meriam Nusantara dari Negeri Elpa Putih: Tinjauan Awal atas Tipe, Fungsi dan Daerah Asal*. **Kapata Arkeologi**. Vol 2 Nomor 2 Juli 2006. Balai Arkeologi Ambon.
-2006b *Periode Awal Kerajaan Hitu Hingga Masa Surutnya.Retrospeksi Arkeologi Sejarah*. **Kapata Arkeologi**. Vol 2 Nomor 3 November 2006. Balai Arkeologi Ambon.
- Jafaar, I.A 2006. **Jejak Portugis di Maluku Utara**. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Abbas, 2005, *Sistem Pertahanan di Batavia Abad XVII-XVIII*, Dalam **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII**. Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta, 1998-1999
- Lapian, A.B *Ternate sekitar Pertengahan Abad ke- 16 dalam Ternate : Bandar Jalur Sutera*. M.J Abdurrahman (ed). Ternate: LinTas (Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial
- Mardai, Gadis (30 January 1999). "Ambon rioting leaves 100 dead in Indonesia". World Socialist Website. Retrieved on 2007-01-10.
- Ricklefs, M.C. (1991). **A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition**. London: MacMillan
- Mansyur, Syahrudin, 2006 *Sistem Pertahanan Kolonial di Maluku Abad XVI-XIX*. **Kapata Arkeologi**. Vol 2 No. 3 November 2006. Balai Arkeologi Ambon
- Putuhena, Saleh 2001 *Proses Perluasan Agama Islam di Maluku Utara dalam Ternate: Bandar jalur Sutera*. M.J Abdurrahman, et.al (ed). Ternate. LinTas (Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial)

Ririmasse NR Marlon 2006a *Aspek-Aspek Kronologi Arkeologi Kolonial di Pulau Kisar. Berita Penelitian Arkeologi*. Vol. 2 Nomor 2 Juli 2006. Balai Arkeologi Ambon

....., 2006b *Tata Kota Ambon Abad XVI-XVIII. Kapata Arkeologi* Vol.2 Nomr 2 Juli 2006. Balai Arkeologi Ambon.

Sahusilawane, Florence 1996, **Laporan Penelitian Arkeologi Islam Maluku di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.** Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Balai Arkeologi Ambon.

www. wikipedia.com. The free encyclopedia.diakes tanggal 14 Juli 2008